



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUDA AGUNG
2. Jabatan : DEPUTI GUBERNUR
3. NHK : 210255

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 18.021.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
3. Bangunan Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 240.900.000
4. Bangunan Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 240.900.000
5. Tanah Seluas 237 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.700.000.000
6. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 661.550.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER DIESEL 2.4 VRZ A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 519.850.000
2. MOBIL, TOYOTA CALYA ASTRA M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 141.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ---****D. SURAT BERHARGA****Rp. 3.077.094.000****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 8.324.600.862**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	30.085.044.862
III. HUTANG	Rp.	1.895.488.510
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	28.189.556.352

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.